

Studi Empiris tentang Keterkaitan antara Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Andi Pattiware, Andi Maryam

Program Studi Akuntansi STIEM Bongaya Makassar

email : andi.pattiware@stiem-bongaya.ac.id

***Abstract** : This study aims to determine and analyze regional financial management, on the financial performance of accountability, and transparency the sinjai study, qualitative research district government. In this methods with descriptive population in this statistics were used. The study is the entire sinjai district organization which amounts to 40 agencies regional apparatus. The sample in regional apparatus the study was 66 people, the organization (dinas) of sinjai dinas. The results of these data district amounted to 22 are tested with the classical Assumption (Validity and Reability Test) the Test (Normality Test, , the data analysis Multicollonuerity Test). Meanwhile technique used is multiple the data was collected, linear regression. after it was analyzed using the SPSS (Statistical Product and Service Solution) Version 26 program. Based on the results of the hypothesis test, it shows that Regional has no effect and is not Financial Management significant on the Financial Governments, while Performance of Local Accountability has a positive and Financial Performance of Local significant effect on the Governments, and and significant effect Transparency has a positive on the financial performance of local governments.*

***Keywords:** Regional Financial Management, Accountability, Transparency*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan keuangan daerah, terhadap akuntabilitas kinerja keuangan, dan transparansi pemerintah daerah Kabupaten Sinjai, penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan populasi sebagai alat statistik. Penelitian ini adalah seluruh organisasi perangkat daerah Kabupaten Sinjai yang berjumlah 40 instansi perangkat daerah. Sampel dalam penelitian perangkat daerah ini sebanyak 66 orang, yaitu dinas-dinas dinas Sinjai. Hasil penelitian data kecamatan berjumlah 22 diuji dengan uji asumsi klasik (Uji Validitas dan Reabilitas), Uji Normalitas, Analisis data menggunakan Uji Multikolonieritas. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Setelah itu dianalisis dengan menggunakan program SPSS (Statistical Product and Service Solution) Versi 26. Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Keuangan Pemerintah Daerah, sedangkan Akuntabilitas Kinerja Daerah berpengaruh positif dan Kinerja Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Keuangan Pemerintah Daerah, dan Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, Transparansi

PENDAHULUAN

Tingginya asumsi masyarakat terhadap pelaksanaan otonomi daerah menyebabkan kinerja pemerintah menjadi salah satu isu yang menjadi sorotan publik. Hal ini dikarenakan masyarakat belum merasakan kinerja pemerintah secara maksimal. Keberhasilan kinerja pemerintahan dapat dinilai dari segi pembangunan baik di bidang ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Masyarakat luas menilai keberhasilan pembangunan pada bidang ekonomi yang terwujud dalam pembangunan infrastruktur. Pembangunan bukan hanya berarti penekanan pada akselerasi dan keberhasilan di bidang ekonomi, namun meliputi reorganisasi dan pembaharuan seluruh sistem dan aktivitas ekonomi dan sosial dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat (Damayanti & Hermanto, 2018).

Tuntutan agar instansi pemerintah terutama bagi pemerintah daerah untuk dapat mengukur kinerja semakin besar dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. suatu pengukuran kinerja manajerial yang sah dan dapat dipercaya mutlak diperlukan untuk menilai prestasi manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. Maka pengukuran kinerja manajerial instansi pemerintah patut mendapatkan perhatian yang serius sebab berkaitan dengan tanggung jawab alokasi anggaran daerah. Agar pemerintahan yang baik tersebut menjadi kenyataan dan sukses, maka kualitas pelaksanaan kerjanya harus ditingkatkan. Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah dituntut untuk melaksanakan kinerja yang baik dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya (Putu & Indraswarawati, 2021).

Suatu daerah dapat dikatakan mandiri jika mampu menyelenggarakan pemerintahan di daerahnya atau mampu menyelenggarakan otonomi daerah yang baik memiliki ciri dan kemampuan dibidang keuangan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pasal 1 ayat 2 tentang pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah dapat didefinisikan sebagai semua aktivitas atau kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dalam penelitian ini sebagai organisasi perangkat daerah yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah daerah dalam menjalankan elemen-elemen keuangan daerahnya sehingga apabila pengelolaan keuangan daerah tidak dikelola dengan baik dapat memberikan peluang terjadinya penyalahgunaan atau penyimpangan seperti korupsi, penggelapan asset ataupun bentuk penyalahgunaan lainnya yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian bagi pemerintah dan dapat menyengsarakan masyarakat didaerahnya, Sehingga apabila pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya dengan baik akan memberikan dampak pada kinerja keuangan daerah yang baik pula. (Suryani & Robinsyah, 2022).

Di sisi lain akuntabilitas sangat diperlukan sebagai bentuk suatu pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat. Dalam menjalankan atau melaksanakan akuntabilitas publik para pejabat pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak publik. Selain pengelolaan keuangan daerah dan akuntabilitas dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah, juga perlu adanya transparansi. Transparansi adalah memberikan informasi terbuka kepada masyarakat yang real dan jujur sesuai dengan perundang-undangan, dengan dilakukannya transparansi publik masyarakat dapat memperoleh informasi yang aktual. Sehingga pemerintah bisa dikatakan transparan apabila penyelenggaraan pemerintah dapat diakses dan diketahui dengan mudah oleh masyarakat sehingga masyarakat bisa menyeleksi dan mengevaluasi kinerja pemerintah (Laga & Hidayat, 2021).

Kinerja pemerintah harus diukur agar diketahui bagaimana pemerintah melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis untuk menilai apakah program kegiatan yang telah direncanakan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana tersebut, dan yang lebih penting adalah apakah telah mencapai keberhasilan yang telah

ditargetkan pada saat perencanaan. Pengukuran kinerja dimulai dengan penetapan indikator kinerja yang memberikan informasi sedemikian rupa sehingga memungkinkan unit kerja sektor publik untuk memonitor kinerjanya dalam menghasilkan output dan outcome terhadap masyarakat. Selain perencanaan, aspek capaian indikator kinerja pun dinilai banyak yang tidak mencapai target. Pencapaian indikator kinerja merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah (Sarmigi & Maryanto, 2020).

Pemerintah kabupaten Sinjai merupakan salah satu pemerintah daerah yang menjadi sorotan publik seiring dengan terjadinya suksesi kepemimpinan atau pergantian kepala daerah pada tahun 2018 ini. Kepala daerah yang terpilih harus dapat mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Sinjai sehingga manajemen pemerintahan yang akuntabel dapat terwujud. Berdasarkan Laporan Hasil Ikhtisar Pemeriksaan (LHPS) Tahun 2021, Pemerintah kabupaten sinjai bersama dengan 411 pemerintah daerah yang lain mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel Opini LKPD Pemerintah Daerah Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 1.1
Review Kajian BPK RI terhadap Rezim Sinjai

Tahun	Opini
2013	Pantas Dengan Tanpa Syarat (WDP)
2014	Pantas Dengan Tanpa Syarat (WDP)
2015	Pantas Dengan Tanpa Syarat (WDP)
2016	Pantas Tanpa Tanpa Syarat (WTP)
2017	Pantas Tanpa Tanpa Syarat (WTP)
2018	Pantas Tanpa Tanpa Syarat (WTP)
2019	Pantas Tanpa Tanpa Syarat (WTP)
2020	Pantas Tanpa Tanpa Syarat (WTP)
2021	Pantas Tanpa Tanpa Syarat (WTP)

Sumber www.bpk.go.id wilayah sinjai

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa Opini BPK-RI atas LKPD pada gambar tersebut merupakan salah satu ukuran dalam kinerja keuangan pemerintah daerah, dimana pada tahun 2013-2015 oleh Pemkab Sinjai dalam beberapa tahun selalu mendapatkan Opini WDP yang disebabkan terkait aset tetap yang cukup material menjadi pengecualian atas opini LKPD Kabupaten Sinjai sehingga apabila Opini WTP ingin diraih maka unsur pemerintah dan SKPD di Kabupaten Sinjai harus bekerja sama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparansi yang baik sehingga pada tahun 2016-2021 Opini WTP telah diraih selama 6 tahun berturut-turut oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Sinjai sudah berada pada level yang baik sehingga kepala daerah wajib mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Sinjai. Hal tersebut juga didukung dengan pencapaian yang telah diperoleh dalam acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) LKPD Tahun Anggaran 2021 penyerahannya dilakukan di kantor BPK-RI perwakilan Sulawesi Selatan di Kota Makassar pada tanggal (17/5/2022). (Badan Pemeriksa keuangan, 2022).

Sebelumnya telah ada penelitian terkait variabel di atas seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Nasution, (2018) yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah. Sedangkan penelitian yang dilakukan Agustina & Saifanur, (2020) menyatakan pengelolaan keuangan daerah tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah. Penelitian yang dilakukan Edowati et al., (2021) Elkha & Wahidawati, (2020), dan Made & Wulandari, (2019) yang menyatakan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan Amali & Suwandi, (2021) menyatakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah. Penelitian yang dilakukan Edowati et al., (2021) dan Elkha & Wahidawati, (2020) menunjukkan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah. Sedangkan penelitian yang dilakukan Amali & Suwandi, (2021) dan Made & Wulandari, (2019) menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan eksplorasi kuantitatif. Pemeriksaan kuantitatif diketahui bahwa suatu proses pencarian informasi dimana informasi berupa angka-angka sebagai alat untuk menyelidiki data tentang apa yang diketahui. Dimana penelitian ini memakai metode analisis deskriptif yaitu metode yang dimana data-data dikumpulkan, diklasifikasikan, dianalisis secara objektif sehingga memberikan informasi dan gambaran mengenai topik yang akan dibahas. Tempat penelitian ini dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Sinjai. Adapun pengambilan sampel pada penelitian ini berfokus pada OPD yang berbentuk dinas di Kabupaten sinjai yaitu sebanyak 22 dinas. Alasan peneliti memilih dinas dikarenakan letak geografis kabupaten sinjai yang cukup luas, dan sebaran opd yang cukup luas ada dimasing-masing kecamatan, dengan waktu yang relatif singkat maka peneliti memilih dinas yang berada pada lingkup Kota Kabupaten Sinjai..

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Validitas Variabel Pengelolaan Keuangan Daerah (X1)

Hasil pengujian validitas data untuk masing-masing pernyataan variabel pernyataan Pengelolaan keuangan daerah (X1) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Uji Validitas Data Pengelolaan Keuangan Daerah (X1)

Variabel Pengelolaan Keuangan Daerah (X ₁)						
No.	Variabel	Korelasi		Signifikan		Ket
		r hitung	r tabel	Sign(2-Tailed)	α	
1	X1.1	0,722	0,30	0,000	0,05	Valid
2	X1.2	0,699	0,30	0,000	0,05	Valid
3	X1.3	0,688	0,30	0,000	0,05	Valid
4	X1.4	0,646	0,30	0,000	0,05	Valid
5	X1.5	0,609	0,30	0,000	0,05	Valid

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa semua pernyataan variabel mempunyai nilai r hitung diatas 0,30 dan nominal signifikan lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat di simpulkan bahwa seluruh item pada pernyataan Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan valid dan dapat di proses lebih lanjut

Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas (X₂)

Andi Pattiware, Andi Maryam : *Studi Empiris tentang Keterkaitan antara Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*

Hasil pengujian validitas data untuk masing-masing pernyataan variabel pernyataan Akuntabilitas (X_2) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Uji Validitas Data Akuntabilitas (X_2)

Variabel Akuntabilitas (X_2)						
No.	Variabel	Korelasi		Signifikan		Ket
		r hitung	r tabel	Sign(2-Tailed)	α	
1	X2.1	0,717	0,30	0,000	0,05	Valid
2	X2.2	0,655	0,30	0,000	0,05	Valid
3	X2.3	0,715	0,30	0,000	0,05	Valid
4	X2.4	0,769	0,30	0,000	0,05	Valid

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa semua pernyataan variabel mempunyai nilai r hitung diatas 0,30 dan nominal signifikan lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat di simpulkan bahwa seluruh item pada pernyataan variabel Akuntabilitas dinyatakan valid dan dapat di proses lebih lanjut.

Hasil Uji Validitas Variabel Transparansi (X_3)

Hasil pengujian validitas data untuk masing-masing pernyataan variabel Transparansi (X_3) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Uji Validitas Data Variabel Transparansi (X_3)

Variabel Pengendalian Internal (X_3)						
No.	Variabel	Korelasi		Signifikan		Ket
		r hitung	r tabel	Sign(2-Tailed)	α	
1	X3.1	0,862	0,30	0,000	0,05	Valid
2	X3.2	0,770	0,30	0,000	0,05	Valid
3	X3.3	0,866	0,30	0,000	0,05	Valid
4	X3.4	0,852	0,30	0,000	0,05	Valid

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa semua pernyataan variabel mempunyai nilai r hitung diatas 0,30 dan nominal signifikan lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat di simpulkan bahwa seluruh item pada pernyataan variabel Transparan dinyatakan valid dan dapat di proses lebih lanjut.

Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Hasil pengujian validitas data untuk masing-masing pernyataan variabel pernyataan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Uji Validitas Data Variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y)						
No.	Variabel	Korelasi		Signifikan		Ket
		r hitung	r tabel	Sign(2-Tailed)	α	
1	Y1	0,734	0,30	0,000	0,05	Valid
2	Y2	0,669	0,30	0,000	0,05	Valid
3	Y3	0,392	0,30	0,000	0,05	Valid
4	Y4	0,766	0,30	0,000	0,05	Valid
5	Y5	0,777	0,30	0,000	0,05	Valid

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa semua pernyataan variabel mempunyai nilai r hitung diatas 0,30 dan nominal signifikan lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat di simpulkan bahwa seluruh item pada pernyataan Variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dinyatakan valid dan dapat di proses lebih lanjut.

Uji Realibilitas

Uji realibilitas digunakan untuk mengukur indikator variabel atau konstruk dari suatu kuesioner. Suatu kuesioner reliabel atau handal jika jawaban terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian realibilitas yang digunakan adalah *one shot* atau pengukuran sekali saja. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur realibilitas dengan ujia statistik *Cronbach Alpha*. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan *Cronbach Alpha* > 0,60 dan jika *Cronbach Alpha* < 0,60 maka variabel yang diuji tidak reliable.

Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas Data Pada Variabel X1, X2, X3 dan Y

Variabel	Koefisien Realibilitas (α)	Nilai Batas <i>Cronbach Alpha</i> (α)	Ket
X1	0,767	0,60	Reliable
X2	0,785	0,60	Reliable
X3	0,826	0,60	Reliable
Y	0,763	0,60	Reliable

Berdasarkan hasil uji realibilitas pada tabel diatas, menunjukkan bahwa X1, X2, X3 dan Y dalam penelitian ini memiliki tingkat realibilitas yang baik. Hal ini terlihat dari hasil pengujian dimana nilai *Cronbach Alpha* (α) setiap variabel diatas 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner pada setiap variabel X1, X2, X3 dan Y dalam penelitian ini akan mampu digunakan untuk memperoleh data yang konsisten sehingga semua instrument pernyataan kuesioner menunjukkan keandalan dalam mengukur variabel dalam penelitian ini.

Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan salah satu bagian dari uji persyaratan analisis data atau uji asumsi klasik, dimana sebelum kita melakukan analisis, data tersebut harus diuji kenormalan distribusinya. Dasar pengambilan keputusan uji normalitas adalah jika nilai signifikan *Kolmogorov – Smirnov* > 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikan *Kolmogorov – Smirnov* < 0,05 maka data tersebut tidak berdistribusi normal.

Tabel 7. Hasil Uji Normalitas dengan *Kolmogorov-Smirnov* One-Sample *Kolmogorov-Smirnov* Test

		Unstandardized Residual
N		66
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.64558265
Most Extreme Differences	Absolute	.097
	Positive	.049
	Negative	-.097
Test Statistic		.097
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Berdasarkan tabel 7 menunjukkan bahwa nilai *test statistic* yang diperoleh yaitu 0,097 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 dan *Asymp. Sig. (2-tailed)* di peroleh yaitu sebesar 0,200 sehingga data tersebut berdistribusi normal,dengan demikian pengujian asumsi untuk normalitas data terpenuhi.

Uji Multikolinearitas

Tabel 8 Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	6.219	2.900		2.144			
	Pengelolaan keuangan daerah	-.210	.140		-.160	-1.497	.725	1.379
	Akuntabilitas	.798	.159		.575	5.013	.631	1.584
	Transparansi	.326	.125		.287	2.613	.686	1.458

Berdasarkan tabel 8. diketahui bahwa nilai *tolerance* pada pengelolaan keuangan daerah (X1) sebesar 0,725. Akuntabilitas (X2) sebesar 0,631 dan transparansi (X3) sebesar 0,686. Sedangkan nilai VIF variabel pada pengelolaan keuangan daerah (X1) sebesar 1,379 < 10,00. Akuntabilitas (X2) sebesar 1,584 < 10,00 dan transparansi (X3) sebesar 1,453 < 10,00 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolonieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel. 9 Hasil Uji Heteroskedastisitas Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	6.219	2.900		2.144	.036	
	Pengelolaan keuangan daerah	-.210	.140		-.160	-1.497	.140
	Akuntabilitas	.798	.159		.575	5.013	.000
	Transparansi	.326	.125		.287	2.613	.011

Berdasarkan tabel 9. diketahui bahwa variabel bebas X1 mempunyai nilai signifikan > 0,05 atau 0.140 > 0.05 dan X2 nilai signifikan >0,05 atau 0,000 < 0,05 dan variabel X3 nilai signifikan > 0,05 atau 0,011 < 0,05 Dengan demikian, hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi model regresi.

Tabel 10. Hasil Tes Koefisien Jaminan (R 2) Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	Change Statistics			Sig. F Change
						F Change	df1	df2	
1	.697 ^a	.485	.460	1.685	.485	19.482	3	62	.000

Berdasarkan Tabel 10. diketahui bahwa nilai R Square diketahui bahwa 1,485. Mengingat nilai R Square, tingkat 48,5% dari variabel Pelaksanaan Moneter Dinas Provinsi dapat diperoleh yang masuk akal oleh Administrasi Moneter Teritorial, Tanggung Jawab dan Keterusterangan. Sementara itu, faktor yang tidak dapat dipahami oleh Administrasi Moneter Wilayah, Tanggung Jawab, dan Keterusterangan diketahui bahwa 51,5% (100 persen 48,5%).

Pengelolaan Keuangan Daerah Tidak Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 12 tahun 2019 pasal 1 ayat 2 tentang pengelolaan keuangan daerah dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Berdasarkan perhitungan uji regresi linear berganda pengelolaan keuangan daerah (X1) diperoleh nilai $sign = 0,140$ sementara taraf signifikan $\alpha = 0,05$. Hal ini mengimplikasikan bahwa H_0 diterima karena nilai $sign > taraf\ signifikan\ \alpha = 0,140 > 0,05$. Sementara diperoleh nilai $t\ hitung = -1.497$ dan nilai $t\ tabel = 1,999$ (nilai ini diperoleh dari *microsoft excel* =TINV(5%,66).). Dari data analisis uji t diperoleh nilai $t\ hitung < t\ tabel = 1,497 < 1,999$. Maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah (X1) tidak berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Y).

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh veronica *et al.*, (2020) dan Agustina & Saifanur, (2020) yang mengatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena adanya berbagai hal diantaranya sangat erat disebabkan oleh belum maksimalnya pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah dibidang keuangan dan pemanfaatan sistem anggaran bagi asn, termasuk bahwa pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan tidak konsisten sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pengeluaran keuangan daerah yang dilakukan belum berorientasi pada pencapaian visi-misi, tujuan dan hasil terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sinjai tersebut. Akan tetapi penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasution, (2018) yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Akuntabilitas Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik.

Berdasarkan perhitungan uji regresi linear berganda, akuntabilitas (X2) diperoleh nilai Sementara taraf signifikan $\alpha = 0,05$. Hal ini mengimplikasikan bahwa H_0 diterima karena nilai $sign < taraf\ signifikan\ \alpha = 0,000 < 0,05$ diperoleh nilai $t\ hitung = -5.013$ dan nilai $t\ tabel = 1,999$ (nilai ini diperoleh dari *microsoft excel* =TINV(5%,66). Hal ini mengimplikasikan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima karena nilai $t\ hitung > t\ tabel = 5,013 > 1,999$. Hal ini sesuai dengan teori stakeholder dimana stakeholder berperan sebagai pemerintah mengindikasikan bahwa semakin baik bentuk pertanggungjawaban pemerintah maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan semakin baik. Setiap instansi pemerintah dituntut untuk mempertanggungjawabkan laporan keuangan dan laporan kinerja dengan cara mampu menyajikan dan menjelaskan seluruh hasil dari program atau kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga semua pihak yang berkepentingan dapat menilai apakah pemerintah telah melaksanakan kerjanya secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Elkha & Wahidawati, (2020) dan (Nasution, 2018) yang mengatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah bisa memberikan pertanggung jawaban atas semua kegiatan yang dilaksanakan. Semakin baik bentuk bentuk pertanggung jawaban pemerintah kepada masyarakat, maka semakin baik pula pemerintah dalam melaksanakan kerjanya. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Amali & Suwandi, 2021) yang menyatakan bahwa Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Transparansi Berpengaruh Dan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan perhitungan uji regresi linear berganda, Transparansi (X3) diperoleh nilai signifikan $\alpha = 0,011$ sementara taraf signifikansi $\alpha = 0,05$. Hal ini mengimplikasikan bahwa H_0 ditolak karena nilai $sign < taraf\ signifikan$ $\alpha = 0,011 < 0,05$. Sementara nilai $t\ hitung = 2,613$ $t\ tabel = 1,999$ (nilai ini diperoleh dari *microsoft excel* =TINV(5%,66). Hal ini mengimplikasikan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima karena nilai $t\ hitung > t\ tabel = 5,013 > 1,999$. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik transparansi yang diterapkan oleh pemerintah OPD Kabupaten Sinjai, maka kinerja pemerintah meningkat. Keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintah merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik sehingga menciptakan pemerintah yang bersih dan akuntabel. Informasi yang diberikan secara memadai dan mudah dipahami digunakan sebagai alat untuk memonitoring dan mengevaluasi hasil kinerja dalam organisasi. Akses untuk memperoleh informasi sangatlah penting dalam menjamin pertanggungjawaban pemerintah.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Edowati, et.al. (2021) dan Elkha & Wahidawati, (2020) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dapat disimpulkan bahwa dengan memberikan Informasi yang memadai dan mudah dipahami dan digunakan sebagai alat untuk memonitoring dan mengevaluasi hasil kinerja dalam organisasi. Akses untuk memperoleh informasi sangatlah penting dalam menjamin pertanggungjawaban pemerintah. Namun hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Amali & Suwandi, (2021) dan Elkha & Wahidawati, (2020) yang mengatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kesimpulan

Mengingat hasil dan percakapan baru-baru ini diungkapkan. Hasil akhir yang dapat dihasilkan mengingat hasil penelitian ini diketahui bahwa sebagai berikut : Tata Kelola Moneter Wilayah sangat berdampak terhadap Pameran Moneter Dinas Wilayah Sinjai. Keterbukaan secara bermakna memengaruhi Keterusterangan Data Moneter.Akuntabilitas memdampaki proses kerja moneter dinas Peraturan Sinjai.Keterbukaan memdampaki proses kerja pendanaan dinas wilayah Sinjai

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, N., dan Saifanur, A. (2020). Dampak Penyelenggaraan Kerangka Pembukuan, Penatausahaan Moneter Provinsi dan Pengendalian Orang Dalam terhadap Penyelenggaraan Moneter Dinas Aceh Utara. 85-98.
- Ahmad, IH (2017). Dampak Kerangka Pembukuan, Insentif Standar Kas dan Keterusterangan dalam Pelaksanaan Moneter Wilayah (Analisis kontekstual dalam.... Buku Harian Logis AKMEN, 677-691.
- Amali, MN, dan Suwandi, ED (2021). Dampak Pengawasan, Tanggung Jawab, dan Keterusterangan Moneter Wilayah terhadap Penyelenggaraan Dinasan (Konsentrasi SKPD Perda Kebumen). Catatan Logis Para Eksekutif, Mahasiswa Bisnis dan Pembukuan , 3 ((6)).
- Anwar, A., dan Meutia, T. (2021). Dampak Tata Kelola Moneter dan Government Inside Control Framework (SPIP) Pada Pameran Perangkat Dinas Lingkungan di Kota Langsa.
- Anwar, A., dan Tuti, M. (2021). Dampak Tata Kelola Moneter dan Government Inward Control Framework (SPIP) Terhadap Penyelenggaraan Musyawarah Mekanis Dinasan Terdekat di Kota Langsa. Jurusan Pembukuan Laut , 1 - 12 .
- Pengkajian Badan Pimpinan Republik Indonesia. (2022). Mengisi Berita Sehari-hari.
- Damayanti, E. (2018). Dampak Tanggung Jawab, Keterusterangan dan Kontrol Ke Dalam Terhadap Penyelenggaraan Dinasan .
- Damayanti, E., dan Hermanto, SB (2018). Dampak Tanggung Jawab, Keterusterangan dan Kontrol Ke Dalam Terhadap Penyelenggaraan Dinas. Diary of Da Sciences , 7 (3), 1-21.
- Edowati, M., Abubakar, H., dan Said, M. (2021). Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Keterusterangan dalam Administrasi Moneter Teritorial pada Pameran Badan Legislatif Provinsi Rejim Deiyai. Buku Harian Bisnis Indonesia dan Para Eksekutif , 4 (1), 87-96.
- Elkha, F., dan Wahidawati. (2020). Dampak Pengendalian Orang Dalam, Tanggung Jawab, dan Keterusterangan dalam Penyelenggaraan Moneter Wilayah terhadap Penyelenggaraan Dinasan Wilayah. Catatan Harian Pembukuan Ilmu dan Eksplorasi , 9 (3), 1-19.
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Tesan Multivariat Dengan Program IBM SPSS 23 . Kantor Distribusi Perguruan Tinggi Diponegoro.
- Halim, dan Abdul. (2012). Pembukuan Pendanaan Wilayah dan Wilayah Publik . Salemba Empat.
- Harjito, Y., Nugraha, PS, dan Yulianto, Y. (2020). Pemeriksaan Penyajian Moneter Peraturan dan Dinasan Wilayah di Indonesia. Jae (Buku Harian Pembukuan dan Aspek Pendanaan), 5 (1), 19-28. <https://doi.org/10.29407/jae.v5i1.14061>
- Jatmiko, B. (2020). Dampak Pengawasan Ke Dalam, Tanggung Jawab dan Keterusterangan Terhadap Pameran Dinasan Wilayah Dinasan Sleman (Tinjauan Seluruh SKPD Rezim Sleman). Catatan Harian Pembukuan Trisakti, 7 (2), 231. <https://doi.org/10.25105/jat.v7i2.7446>
- Kegiatan, YMVI, dan Hidayat, MT (2021). Dampak Tanggung Jawab Pengawasan Moneter Wilayah dan Keterusterangan Dalam Penyelenggaraan Moneter Provinsi Pada Pameran DPRD Bagian Flores Timur. Rilis Global Angewandte Chemie, 6(11), 951-952.
- Lukito, Penny, K. (2014). Memberikan Keterusterangan dan Tanggung Jawab untuk Eksekusi Area Publik: Kesulitan dari Dinasan Mayoritas Berlangsung . Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Made, A., dan Wulandari, R. (2019). Kajian Dampak Pelaksanaan Perencanaan Berbasis Pelaksanaan, Tanggung Jawab dan Keterusterangan terhadap Pelaksanaan Moneter Wilayah di Kota Malang. 7 (2).

- Mahsun, M. (2017). Isu Buruh Dan Legislatif: Pencapaian Dan Cutoff Points Dari Organisasi Ternama Di Batang, Jawa Tengah (YI Institut (ed.)).
- Mardiasmo. (2017). Dampak Kerangka Pembukuan Moneter Wilayah, Administrasi Moneter Provinsi, dan Administrasi Besar terhadap Penyelenggaraan Dinasan Lingkungan. *JOMFekom* , 4 (1), 843-857.
- Nurazizah, M., Agus, A., & Sadeli, Y. A. (2023). Implementasi Risk Based Audit Terhadap Perencanaan Audit Dan Kualitas Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Bongaya*, 7(1), 88–100
- Nasution, dito darma nasution. (2018). Kajian Dampak Administrasi Moneter Provinsi, Tanggung Jawab dan Keterusterangan terhadap Pelaksanaan Moneter Dinas. *Buku Harian Ilmu Pembukuan dan Uang*, 2(3), 149-262.
- Novatiani, A., Rusmawan Kusumah, RW, dan Vabiani, DP (2019). Dampak Keterusterangan dan Tanggung Jawab terhadap Pameran Instansi Dinas. *Buku Harian Para Eksekutif dan Ilmu Bisnis* , 10 (1), 51-62. <https://doi.org/10.17509/jimb.v10i1.15983>
- Perawati, siska. (2021). Sistem Pengendalian Intern dan Kompetensi Sumber Daya Manusia : Sebuah Kajian Efektivitas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah. *BJRM (Bongaya Journal of Research in Management)*, 4(2), 54–65
- Sarmigi, E., dan Maryanto, M. (2020). Dampak Administrasi Moneter Teritorial dan Administrasi Besar Terhadap Presentasi DPRD Rezim Kerinci. *Buku Harian Penghargaan Moneter* , 8 (1), 153-162.
- Suryana, GA, Edy, S., dan Putu Julianto. (2017). Dampak Administrasi Moneter Wilayah, Tanggung Jawab Kewenangan, dan Remunerasi terhadap Presentasi Majelis Mekanik Dinasan Lingkungan. *E-Diary S1 Ak Ganesha College of Schooling* , 8 (2), 1-12.
- Suryani, P., dan Robinsyah, A. (2022). Pelaksanaan Dinasan Terbuka dan Moneter Teritorial Rejim Dinas Bengkulu Pusat. *Buku Harian Eksplorasi Mahasiswa Pembukuan* , 10 (1), 60-70.
- Susanto, A. Budi, dan Rachmawati, L. (2013). Dampak Human Improvement File (IPM) dan Perluasan Pembangunan Finansial di Dinasan Lamongan. 1-18.
- veronica, stevani, layuk, A., dan rante, andika. (2020). Dampak Pengawasan, Kerangka Pembukuan dan Administrasi Moneter Teritorial terhadap Penyelenggaraan Dinasan Sekitarnya. *Buku Harian Logis Penegasan* , 17(4),